



### STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) DENGAN PENDEKATAN *SECTORAL ECONOMIC ANALYSIS* DI PROVINSI BANTEN

**Randi Mamola, Chaniago Marsega, dan Widia Yulianti**

email korespondensi: [randimamola2@gmail.com](mailto:randimamola2@gmail.com)

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Banten

#### ABSTRAK

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah otonomi baru yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, baik di sektor pertanian, kelautan, dan industri yang seharusnya membuat Provinsi Banten memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Meskipun Provinsi Banten memiliki kekayaan alam yang besar, akan tetapi menurut data Badan Pusat Statistik Nasional menyatakan bahwa Provinsi Banten masih dikategorikan tinggi dalam hal pengangguran dan kemiskinan. Hal ini, menyebabkan tingkat pendapatan per kapita di Provinsi Banten masih termasuk ke dalam kategori pada pendapatan menengah (*Middle Income*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan pengembangan wilayah melalui sektor unggulan di Provinsi Banten menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral difokuskan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis sektoral yang terdiri dari metode analisis LQ, *Shift-Share*, dan Tipologi *Klassen*. Berdasarkan hasil penelitian dari data PDRB, terdapat 9 sektor potensial ekonomi di Provinsi Banten yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, hotel dan restoran, transportasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. Dengan mengetahui beberapa sektor unggulan, maka dapat diharapkan menjadi dasar perumusan bagi kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan per kapita di Provinsi Banten.

**Kata Kunci:** *AHP, Sektor Unggulan, Pendekatan Sektoral, Pendapatan per kapita*

#### PENDAHULUAN

##### Latar Belakang

Di era otonomi daerah yang sedang berlangsung saat ini, informasi mengenai kondisi perekonomian di suatu wilayah dapat berguna untuk membuat perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi

wilayah adalah melalui pengembangan potensi dari sektor unggulan yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah melalui bentuk kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi

prioritas unggulan di wilayah tersebut (Wiranto, 2007). Pembangunan wilayah dapat dilakukan melalui pengembangan pada sektor-sektor unggulan yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah sekitar, tak terkecuali khususnya pada pengembangan wilayah di Provinsi Banten.

Provinsi Banten termasuk ke dalam salah satu daerah otonomi baru yang memiliki luas wilayah 9.662,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 12,69 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.134 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Banten, 2018). Provinsi Banten memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah di berbagai sektor, sehingga potensi dari beberapa sektor unggulan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah. Kegiatan perekonomian di Provinsi Banten didukung oleh 9 sektor potensial yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan konstruksi, hotel dan restoran, informasi dan komunikasi, *real estate*, dan jasa-jasa lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 20,91% dan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81% (BPS Provinsi Banten, 2018).

Tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Provinsi Banten. Meskipun semua potensi dan kekayaan alam, di berbagai sektor sangat besar, tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data BPS Provinsi Banten (2018), bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten menduduki posisi pertama di Pulau Jawa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,52% dari total penduduk angkatan kerja, sedangkan untuk tingkat kemiskinan sebesar 5,25%. Dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan

di Provinsi Banten, menyebabkan tingkat PDRB di Provinsi Banten menduduki peringkat ke-17 dengan rata-rata sebesar Rp 48,46 juta di antara Provinsi di Pulau Jawa (BPS Provinsi Banten, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten belum optimal, sehingga pendapatan per kapita di Provinsi Banten dikategorikan pada pendapatan menengah (*Middle Income*).

Oleh karena itu, pengembangan wilayah melalui *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan pendekatan analisis sektoral di Provinsi Banten sangat diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. Pengembangan tersebut sangat penting bagi kebijakan pemerintah untuk mengelola sektor unggulan yang digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan per kapita di Provinsi Banten.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Provinsi Banten?
2. Bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di wilayah Provinsi Banten ?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan sektor unggulan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten ?

### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui kontribusi sektor unggulan terhadap kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di wilayah Provinsi Banten.

3. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan sektor unggulan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten

### **Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini, antara lain:

1. Mengembangkan sektor unggulan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Provinsi Banten.
2. Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Teori Pembangunan Dalam Pengembangan Wilayah**

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang digunakan untuk membangun berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah untuk diberdayakan secara terpadu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat (Nugroho & Rochimin, 2004). Perencanaan dalam pembangunan wilayah tidak dapat dibangun secara sembarangan, melainkan lebih menekankan pada aspek ekonomi pada masalah lokasi atau ruang yang merupakan suatu aktivitas ekonomi di dalam lingkup masyarakat (Nurzaman, 2012). Melalui perencanaan dalam pembangunan wilayah yang strategis, diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan wilayah.

Tahapan awal pada proses pembangunan wilayah cenderung akan semakin membesar, sehingga percepatan dalam pertumbuhan antar wilayah akan mengalami kesenjangan atau disparitas (Friedman & Weaver, 1979). Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah, antara lain (Friedman & Weaver, 1979) :

- a. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian dari daerah yang kurang berkembang menuju daerah yang telah berkembang.
- b. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang, karena pasar di suatu daerah berkembang memiliki keuntungan yang relatif besar.
- c. Kebijakan pemerintah yang cenderung lebih terkonsentrasi dalam pembangunan sarana dan prasarana di daerah yang telah berkembang.
- d. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh sektor-sektor industri-industri di daerah yang telah berkembang.

Pembangunan wilayah terkait dengan strategi pembangunan adalah perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi oleh setiap wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pada aspek kewilayahan, apabila telah memenuhi tiga pilar dalam proses pembangunan. Adapun tiga pilar dalam proses pembangunan wilayah, yaitu (Nugroho & Rochimin, 2004) :

1. Keunggulan Komparatif (*imperfect mobility of factor*)

Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antarwilayah (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya).

2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*)

Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial.

### 3. Biaya Transportasi (*imperfect mobility of good and service*)

Pilar ini adalah pilar yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasi dari pilar ini adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi yang tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Salah satu langkah untuk mengurangi ketidakmerataan atau disparitas dalam proses pembangunan wilayah adalah melalui basis sektor unggulan. Melalui basis sektor unggulan dapat meningkatkan keunggulan wilayah yang mengacu pada ketersediaan faktor produksi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Ketika sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat meningkatkan keunggulan di suatu wilayah, maka keunggulan komparatif dari wilayah lain akan berpindah dari wilayah yang belum berkembang dengan mengikuti aliran modal dan migrasi. Hal ini memberikan dasar bagi suatu wilayah untuk mempertimbangkan sektor unggulannya untuk mengantisipasi ketidakmerataan di suatu wilayah melalui potensi yang dimilikinya.

#### **Konsep AHP (*Analytical Hierarchy Process*)**

*Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung pada keputusan ini akan membahas masalah berbagai faktor dan kriteria yang kompleks sehingga menjadi suatu hierarki (Saaty, 1993). Keputusan atau hierarki merupakan suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dari berbagai level seperti tujuan, level yang diikuti oleh berbagai faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari suatu alternatif.

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain, karena terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi dari berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Dengan melalui proses hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki yang lebih terstruktur dan sistematis (Saaty, 1990).

#### **Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Teori basis ini dapat digolongkan menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor yang melayani kegiatan yang ada di luar batas wilayah perekonomian, baik di daerah maupun di luar daerah. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat yang ada di dalam batas wilayah tersebut.

Inti dari teori basis ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat ekspor di wilayah tersebut. Sektor basis dan non basis pada perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau sektor unggulan dengan cara membandingkan peran dalam perekonomian daerah dengan

peran kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia & Imelia, 2006).

### Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang menyuplai input maupun sektor yang memanfaatkan output sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006). Sektor unggulan yang merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan sebagai sektor yang dapat menyebar ke berbagai saluran ekonomi yang mampu mendorong perekonomian secara keseluruhan. Salah satu sektor yang memiliki keunggulan pada suatu wilayah harus terdapat ciri-ciri, sebagai berikut (Tjokroamodjojo, 1993):

1. Sektor tersebut harus memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.
3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi, baik keterkaitan ke depan ataupun ke belakang.
4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

### Konsep Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita atau PNB per kapita merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (BPS, 2018). Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur dari kesejahteraan dari suatu wilayah. Suatu wilayah yang memiliki nilai pendapatan yang tinggi belum tentu tingkat kesejahtraannya meningkat dibandingkan dengan wilayah lain. Apabila wilayah yang

memiliki pendapatan yang tinggi, namun tingkat pengangguran dan kemiskinannya tinggi maka belum tentu wilayah tersebut digolongkan sebagai kelompok wilayah yang sejahtera (Handayani, 2016).

Metode perhitungan pendapatan per kapita akan memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran di dalam suatu wilayah, dengan cara membagi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Angka dari hasil pembagian tersebut dikenal sebagai angka pendapatan per kapita. PNB (Produk Nasional Bruto) yang digunakan dalam perhitungan pendapatan per kapita hanya menghitung nilai tambah pendapatan warga negara, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dapat menjelaskan pendapatan warga negara yang sesungguhnya. Dengan demikian, rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut :

$$= h$$

Perhitungan pendapatan per kapita atau PNB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial atau masyarakat. Apabila pendapatan per kapita semakin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan memperoleh pekerjaan, kesehatan dan pendidikan juga akan semakin meningkat. Hal tersebut juga harus dapat berjalan sesuai dengan peningkatan dan pemerataan distribusi pendapatan di setiap wilayah (Sukirno, 2006).

## METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Banten dengan memusatkan pembahasan mengenai sektor unggulan dan melihat tingkat kemajuan suatu wilayah di Provinsi Banten dari sisi penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan tahun 2016-2019 yang dibandingkan dengan tingkat nasional. Untuk data yang di analisis dengan menggunakan AHP, maka dilakukan proses wawancara. Karena keterbatasan peneliti, objek yang diwawancarai adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan pada waktu dua minggu pada bulan Maret 2020 di wilayah Provinsi Banten.

### **Teknik Pengumpulan Data atau Informasi**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini, yaitu berupa data primer dan sekunder, sedangkan informan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Banten. Karena keterbatasan peneliti, sumber data yang dikumpulkan untuk penilaian sektor industri dalam metode AHP hanya diambil dari satu informan. Data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian akan dikumpulkan melalui dua metode pengumpulan data, yakni :

#### 1. Wawancara atau *Interview*

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung dengan informan terkait segala pertanyaan yang akan diajukan sebagai pembobotan data dalam analisis AHP. Pengambilan data dari hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan secara manual melalui bobot pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dalam menentukan keputusan dan kebijakan pada pengembangan sektor unggulan tersebut.

#### 2. Laporan Terpublikasi

Untuk mengimplementasikan analisis LQ, *Shift-share* dan Tipologi *Klassen* dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS berupa data PDRB atas dasar harga konstan pada empat tahun terakhir, yaitu 2016-2019 serta data laporan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Banten.

### **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, kemudian diolah agar dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk tulisan yang bersifat kuantitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengolahan data AHP dan PDRB melalui metode LQ, *shift-share*, dan Tipologi *klassen*, yaitu menggunakan alat *software* berupa *Ms. Excel* untuk memperoleh hasil dan kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Data yang sudah diolah, diinterpretasikan dan dipaparkan secara sistematis yang akan digunakan dalam lingkup pembahasan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sektoral dengan metode AHP. Analisis data yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan, akan menggunakan beberapa metode analisis yang dibutuhkan oleh penelitian, di antaranya adalah:

#### 1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

*Location Quotient* (LQ) adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam perekonomian wilayah. Adapun rumus matematis *Location Quotient* (LQ), antara lain :

$$= \frac{\text{---}}{\text{---}} //$$

Penafsiran nilai LQ :

$LQ > 1$  = sektor basis atau sektor unggulan.

$LQ < 1$  = sektor non basis atau sektor bukan unggulan.

$LQ = 1$  = sektor seimbang.

## 2. Analisis *Shift-Share*

*Shift-share* adalah teknik analisis yang digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan perekonomian di suatu wilayah selama dua periode. Adapun rumus matematis *Shift-share*, antara lain :

$$SS = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Penafsiran nilai *Shift-share* :

$N_{ij}$  bernilai positif ( $N_{ij} > 0$ ) Pertumbuhan pada sektor  $i$  tumbuh lebih cepat dan jika  $N_{ij}$  bernilai negatif ( $N_{ij} < 0$ ) Pertumbuhan pada sektor  $i$  tumbuh lebih lambat.

$M_{ij}$  bernilai positif ( $M_{ij} > 0$ ) Bauran pada sektor  $i$  tumbuh lebih cepat dan jika  $M_{ij}$  bernilai negatif ( $M_{ij} < 0$ ) Bauran pada sektor  $i$  tumbuh lebih lambat.

$C_{ij}$  bernilai positif ( $C_{ij} > 0$ ) Sektor  $i$  memiliki daya saing dan jika  $C_{ij}$  bernilai negatif ( $C_{ij} < 0$ ) Sektor  $i$  tidak memiliki daya saing.

## 3. Tipologi *Klassen*

Tipologi *Klassen* adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah dengan basis data besaran pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dengan pembagian besaran rata-rata.

Penafsiran nilai Tipologi *Klassen* ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1** Penafsiran nilai Tipologi *Klassen*

|          | $si > s$                       | $si < s$                    |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| $gi > g$ | "Sektor maju dan Tumbuh Cepat" | "Sektor Berkembang Cepat"   |
| $gi < g$ | "Sektor Maju Tetapi Tertekan"  | "Sektor Relatif Tertinggal" |

## 4. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analisis AHP adalah teknik analisis data dengan mengambil suatu keputusan dengan mengombinasikan pertimbangan dan nilai pribadi secara logis, dapat menyusun skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang telah terjadi. Metode ini akan membantu penulis untuk menentukan bobot setiap indikator dari hasil wawancara yang kemudian akan diolah dengan menggunakan metode AHP.

Dalam metode penulisan, penulis mengaitkan pada data yang diperoleh dari wawancara dan data PDRB dengan menggunakan analisis sektoral dan AHP, sehingga didapatkan suatu hasil dan kesimpulan dari kesesuaian analisis data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penentuan dan Perkembangan Sektor Unggulan di Provinsi Banten

Penentuan perkembangan sektor unggulan merupakan salah satu langkah awal untuk menuju pembangunan yang lebih terarah dengan memperhatikan pada konsep efisiensi dan potensi ekonomi suatu wilayah. Setiap wilayah harus mengetahui sektor ekonomi manakah yang menjadi potensi dari sektor unggulannya, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan potensi dari sektor unggulan tersebut (Basuki dan Gayatri, 2009). Terkait penentuan sektor unggulan di Provinsi Banten dapat ditentukan dari struktur ekonomi yang dilihat dari dua sisi yaitu sisi penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah.

Perbandingan rasio penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah pada setiap kategori lapangan usaha Provinsi Banten (sebagai wilayah analisis) dengan PDB nasional (sebagai wilayah referensi), digunakan untuk mengetahui kategori lapangan usaha apa saja yang unggul dalam hal penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah dengan analisis LQ. Berikut ini hasil perhitungan analisis LQ di Provinsi Banten dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019.

penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah tertinggi yang terdapat di Provinsi Banten.

PDRB Provinsi Banten pada setiap tahunnya dapat dibandingkan dengan PDB nasional untuk melihat kinerja dari berbagai sektor perekonomian yang mengacu pada tahun dasar analisis dan akhir analisis. Analisis *Shift-share* digunakan untuk mengamati struktur kinerja perekonomian dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di Provinsi Banten yang dibandingkan pada sektor yang sama secara



**Gambar 1** Hasil Analisis LQ Pada Sektor Potensial Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2016-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2019 (diolah).

Hasil analisis LQ menunjukkan terdapat 9 kategori sektor potensial menurut lapangan usaha di Provinsi Banten yaitu kategori sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, hotel dan restoran, transportasi, informasi dan telekomunikasi, *real estate*, jasa keuangan dan perusahaan. Dari perkembangan 9 sektor potensial tersebut, terdapat 3 besar nilai LQ tertinggi yang merupakan sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, transportasi, dan *real estate*. Ketiga sektor tersebut menunjukkan keunggulan sektor dalam

nasional. Perubahan relatif struktur dan kinerja perekonomian di Provinsi Banten terhadap perekonomian secara nasional dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah (*Nij*), Bauran industri (*Mij*), dan keunggulan kompetitif (*Cij*). Bila dilihat dari hasil analisis *Shift-share*, 9 sektor potensial di Provinsi Banten yang menunjukkan tingkat perkembangan tertinggi pada pertumbuhan sektor yang menjadi unggulan terhadap PDB nasional adalah sektor industri pengolahan.



**Gambar 2** Hasil Analisis *Shift-share* PDRB Provinsi Banten Tahun 2016-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2019 (diolah).

Dari hasil analisis tersebut, 9 sektor potensial yang memberikan efek terbesar terhadap PDB nasional adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan mempunyai efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah (*Nij*) sebesar Rp 4.160.806.452 atau 32,13%, Bauran Industri (*Mij*) sebesar Rp 11.470.326.264 atau sebesar 39,50% dan keunggulan kompetitif sebesar Rp 39.331.427 atau sebesar 57,48%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dari sisi PDRB di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan dengan PDB secara nasional.

Besaran kontribusi pada sektor unggulan di Provinsi Banten belum cukup memberikan gambaran mengenai pola percepatan pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilakukannya suatu analisis Tipologi *Klassen* untuk mengetahui secara sistematis terhadap laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB per sektor yang diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok atau karakteristik tertentu menurut Tipologi *Klassen*.

Sektor yang dikategorikan sebagai sektor maju dan cepat tumbuh di Provinsi Banten adalah

sektor industri pengolahan, transportasi, dan *real estate* dan sektor yang tergolong berkembang cepat atau potensial adalah sektor pertambangan dan sektor hotel dan restoran. Selain itu dua sektor yang tergolong dalam kategori sektor maju tapi tertekan adalah sektor informasi dan komunikasi dan pertanian. Sedangkan sektor konstruksi dan jasa keuangan dan jasa perusahaan tergolong dalam klasifikasi sektor yang relatif tertinggal.

Kesembilan sektor potensial di Provinsi Banten, umumnya telah memberikan masing-masing kontribusi terhadap perekonomian yang nantinya akan memberikan efek positif bagi penyerapan tenaga kerja dan upah yang digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan mengetahui sektor yang menjadi unggulan, maka sektor ini akan digunakan sebagai kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah di Provinsi Banten.

### Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah di Provinsi Banten

Salah satu indikator keberhasilan pengembangan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari

**Tabel 1** Klasifikasi Tipologi Klassen Pada Sektor Unggulan di Provinsi Banten

| $gi > g$ | $si > s$<br>(Sektor Maju dan Cepat Tumbuh)  | $si < s$<br>(Sektor Berkembang Cepat/Potensial)   |
|----------|---|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Pengolahan</li> <li>• Transportasi</li> <li>• <i>Real estate</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan</li> <li>• Hotel dan Restoran</li> </ul>              |
| $gi < g$ | (Sektor Maju Tapi Tertekan)   | (Sektor Relatif Tertinggal)   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Pertanian</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Keuangan dan Jasa perusahaan</li> <li>• Konstruksi</li> </ul> |

Sumber : Hasil Analisis Data, 2020. (diolah)

Keterangan :

$gi$  = laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Banten.

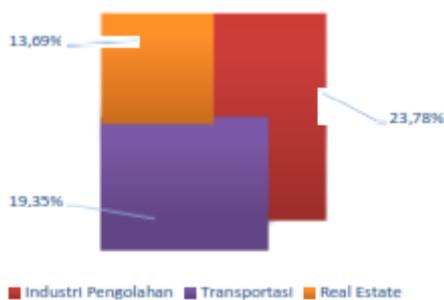
$si$  = kontribusi PDRB sektoral Provinsi Banten.

$g$  = laju pertumbuhan PDB sektoral nasional.

$s$  = kontribusi PDB sektoral nasional.

tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin rendah (Arsyad, 2010). Semakin bertambahnya kegiatan basis pada suatu wilayah akan menambah pendapatan ke dalam suatu wilayah dan sebaliknya, jika kegiatan basis pada suatu wilayah berkurang maka akan mengurangi pendapatan ke dalam suatu wilayah pula (Setiyaningrum, *et.al*, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian suatu wilayah sangat ditentukan oleh sektor unggulan yang merupakan kegiatan aktivitas utama dari kegiatan masyarakat seperti halnya pada tingkat penyerapan tenaga kerja.

Struktur perekonomian Provinsi Banten selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019 didominasi oleh kontribusi sektor industri pengolahan, transportasi, dan *real estate*. Hampir separuh dari sektor perekonomian di Provinsi Banten didukung oleh ketiga sektor unggulan tersebut dengan kontribusi sebesar 56,82 % terhadap tingkat penyerapan angkatan kerja pada tahun 2019 (BPS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, 2019). Namun, dari ketiga sektor unggulan tersebut yang memberikan kontribusi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 23,78% .



**Gambar 3** Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten

Sumber: BPS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, 2019 (diolah)

Secara struktur sektoral, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang menyerap 1,27 juta pekerja atau sebesar 23,78%, meningkat hampir sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan sektor transportasi dan *real estate*. Sedangkan, penduduk yang bekerja di sektor transportasi tercatat sebanyak 1,03 juta pekerja atau sebesar 19,35% dan sektor *real estate* tercatat sebanyak 729 ribu pekerja atau sebesar 13,69%. Dengan kata lain, sektor-sektor unggulan tersebut merupakan sektor yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif yang lebih unggul dalam menyerap tenaga kerja.

Selain dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi yang dapat diamati dari sektor unggulan di Provinsi Banten juga dapat dilihat dari tingkat upah. Tingginya tingkat upah di suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya penyerapan tenaga kerja terhadap sektor yang menjadi aktivitas utama masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, besaran dari ketiga sektor unggulan di Provinsi Banten yang terdiri dari sektor industri pengolahan, transportasi dan *real estate* dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan upah di masyarakat.



**Gambar 4** Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Peningkatan Upah di Provinsi Banten Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, 2019 (diolah)

Dari Gambar 4. tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor unggulan di Provinsi Banten mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun

2016 sampai dengan tahun 2019. Rata-rata kenaikan upah minimum regional di Provinsi Banten mencapai 33,3% dari masing-masing sektor unggulan terhadap peningkatan upah. Dari ketiga sektor ini yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan upah adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp 6.125.757 pada tahun 2019. Keselarasan antara pertumbuhan upah riil dan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Dari sisi sektoral, peningkatan upah dan penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan lebih mendapatkan sorotan karena sektor ini memiliki pangsa pasar terbesar dalam perekonomian dan dapat menjaga kesinambungan pada pertumbuhan ekonomi domestik.

### **Strategi Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan di Provinsi Banten**

Secara detail, apabila melihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dimulai dari menggunakan analisis LQ, *Shift-share*, dan Tipologi *klassen* maka prioritas utama dalam pemilihan kebijakan pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten adalah didasarkan pada kenaikan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu daerah otonomi baru di Pulau Jawa yang dilihat dari pendapatan per kapita masyarakatnya melalui kontribusi sektoral pada penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah.

Struktur sebuah model dari analisis AHP adalah model dari sebuah pohon terbaik. Adapun tujuan tunggal dari model puncak pohon yaitu untuk mewakili tujuan dari masalah pengambilan keputusan. Seratus persen bobot keputusan ada di titik daun yang menunjukkan kriteria, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pembobotan ini harus dibagi di antara titik-titik kriteria berdasarkan rangking.

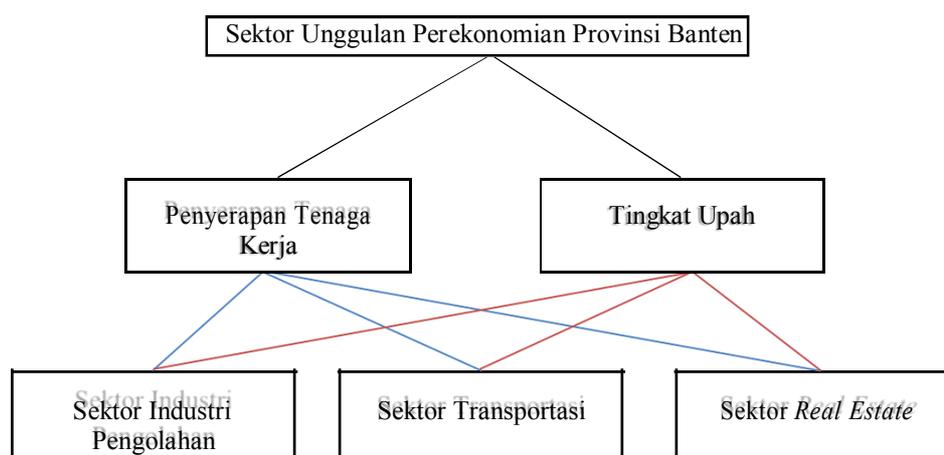
Hasil analisis dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diketahui bahwa sektor unggulan di Provinsi Banten yang memiliki tingkat rangking pertama adalah sektor industri pengolahan dengan memiliki nilai skor tertinggi yaitu 0.3868, dan penyerapan tenaga kerja dengan nilai 0.4370, serta untuk tingkat upah adalah dengan nilai 0.3519.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari analisis AHP sangat signifikan dengan kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa hasil dari sektor industri pengolahan di Provinsi Banten mampu berdaya saing dengan wilayah lain. Selain mampu berdaya saing, sektor industri pengolahan di Provinsi Banten mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di masyarakat. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam kebijakan pengembangan sektor unggulan terutama sektor industri pengolahan, terlebih dahulu harus mengidentifikasi prioritas strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di Provinsi Banten.

**Tabel 2** Prioritas Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan

| <b>Prioritas Kebijakan</b>          | <b>Bobot</b> |
|-------------------------------------|--------------|
| Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja | 0.3699       |
| Peningkatan Tingkat Upah            | 0.3613       |

Sumber : Data Analisis Diolah, 2020



Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2020

**Gambar 5** Penyusunan Hierarki Pada Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan di Provinsi Banten

**Tabel 3** Hasil Analisis AHP Berdasarkan Kontribusi Sektor Unggulan di Provinsi Banten

| Struktur Hierarki          | Hasil Analisis | Skor Terbobot | Rangking |
|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| Level Kriteria             |                |               |          |
| Penyerapan Tenaga Kerja    | 0.2616         | 0.3699        | 1        |
| Tingkat Upah               | 0.2552         | 0.3613        | 2        |
| Level Alternatif           |                |               |          |
| Sektor Industri Pengolahan | 0.4371         | 0.3868        | 1        |
| Sektor Transportasi        | 0.3519         | 0.3677        | 2        |
| Sektor <i>Real Estate</i>  | 0.2643         | 0.2455        | 3        |

Sumber : Hasil Analisis Data, 2020. (diolah)

Prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten tidak hanya didasarkan pada sisi penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah, tetapi juga memperhatikan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga produk-produk yang dihasilkan akan mempunyai daya saing yang tinggi karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Peningkatan terhadap ketiga sektor unggulan di Provinsi Banten tersebut akan mendorong jumlah produksi, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan upah di masyarakat. Kondisi yang sama juga akan

terjadi pada sektor lainnya, sehingga pengembangan ketiga sektor unggulan khususnya sektor industri pengolahan akan mendorong terjadinya pengembangan wilayah (*regional developing*) di Provinsi Banten.

Kebijakan yang telah dipilih dalam pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten diharapkan dapat membawa perekonomian wilayah dan kesejahteraan di Provinsi Banten semakin meningkat. Melalui kebijakan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan upah, maka pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta dapat

**Tabel 4** Prioritas Strategi Pada Pemerintah Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan Industri Pengolahan di Provinsi Banten

| No. | Prioritas Strategi  | Skor  |
|-----|---|-------|
| 1   | Meningkatkan Jumlah Produksi dan Investasi Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja | 2.165 |
| 2   | Meningkatkan Daya Saing   | 1.112 |
| 3   | Mendorong Percepatan Pertumbuhan Klaster Industri Prioritas                           | 1.144 |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (diolah)

membawa potensi dari sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Provinsi Banten.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan metode analisis LQ, *Shift-share*, dan Tipologi *Klassen* hasil dari 9 sektor potensial di Provinsi Banten menunjukkan hasil yang sama, yaitu sektor yang merupakan sektor unggulan atau dominan di Provinsi Banten yaitu sektor industri pengolahan, transportasi, dan *real estate*. Ketiga sektor unggulan tersebut merupakan sektor yang dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh cepat serta memiliki keunggulan komparatif dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
2. Ketiga sektor unggulan yang terdiri dari sektor industri pengolahan, transportasi, dan *real estate* di Provinsi Banten menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah. Akan tetapi, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di Provinsi Banten adalah sektor industri pengolahan.

3. Dilihat dari hasil *Analytical Hierarchy Process* (AHP), kriteria prioritas kebijakan pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten terdiri dari penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah. Kebijakan prioritas peningkatan penyerapan tenaga kerja menduduki prioritas pertama dengan bobot 0,3699 setelah tingkat upah dengan bobot 0,3613, disusul dengan sektor industri pengolahan dengan bobot 0,3868, transportasi dengan bobot 0,3677, dan *real estate* dengan bobot 0,2455. Prioritas kebijakan utama pada pengembangan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di Provinsi Banten adalah sektor industri pengolahan.

### Saran

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah melalui kebijakan pembangunan berbasis prioritas sektor unggulan dan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kategori secara proporsional. Sektor unggulan sebagai sektor basis yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Banten perlu mendapatkan prioritas pengembangan, sehingga akan memberikan dampak yang tinggi terhadap peningkatan upah dan lapangan pekerjaan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan per kapita di Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. *Banten di Tingkat Nasional 2018*. Banten: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen*. Badan Pusat Statistik Press. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2019. *Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Banten 2019*. Banten: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, A.T dan Gayatri, U. 2009. *Penentuan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 10, No.1.
- Emilia dan Imelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Jurusan Ilmu Ekonomi, FE. Universitas Jambi.
- Friedman, John & Weaver, Clyde. 1979. *Territory & Function – The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold.
- Handayani, Novi Sri. 2016. *Pengaruh Jumlah Penduduk, AHH, Rata-rata Lama Sekolah, dan PDRB per kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Udayana. Bali.
- Nugroho, I. Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Nurzaman SS. 2012. *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*. Penerbit ITB.
- Saaty, T. Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hierarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks*. Pustaka Binama Pressindo.
- Saaty, T. Lorie. 1993. *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Pers.
- Saaty, T. Lorie. 1990. *Decision Making The Analytical Hierarchy Process*. United States of America : McGraw – Hill.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPEF – UI Bima Grafika.
- Sukirno, Sadono, 2006. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiyaningrum, A. Hakim, A. Mindarti, L.I. 2013. *Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kudus*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No. 4, Hal. 680-686.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tjokroamodjojo, Bintaro. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga.
- Wiranto, T. 2007. *Pembangunan Wilayah Pesisir Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*. BAPPENAS. Jakarta.

Wijayanti, Diana. 2002. *Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 7, No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UUPSTIMYKPN. Yogyakarta.

\*\*\*

